



DINSOS
KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

**TAHUN
2025-2029**



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029

Tugas :

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- b. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
- d. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman normas standar prosedur dan kreteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Kode		Indikator Kinerja Utama
I.K. T		Indeks Kesejahteraan Sosial
	a	Definisi :
		Penilaian untuk mengukur kesejahteraan sosial yang dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 1 UU 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) melalui tiga dimensi utama yang saling terkait, yaitu kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Indeks kesejahteraan sosial dihitung dengan menggabungkan

	(mengagregasikan) sejumlah indikator penyusun yang telah dinormalisasi dan diberi bobot, sehingga menghasilkan satu nilai indeks komposit yang mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial. Indikator penyusun terdiri dari ketahanan pangan, kecukupan gizi, rumah layak huni, sanitasi layak, air minum layak, derajat kesehatan, akses layanan kesehatan, jenjang pendidikan, kepemilikan jaminan sosial, penerima bantuan sosial, keamanan lingkungan, aksesibilitas lingkungan fisik, ketersediaan alat bantu mobilitas, kemampuan mobilitas mandiri, keikutsertaan, keputusan, kontrol, relasi sosial, keterhubungan, kepatuhan sosial, kesetaraan, kualitas hidup, kepastian hukum, kebijakan inklusif, insentif ekonomi, kemiskinan, PDRB ADHB, gini rasio, jumlah penduduk, sumber penghasilan, diversifikasi penghasilan, kepemilikan aset, serta pengeluaran per kapita (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 68/HUK/2026).																			
b	Satuan																			
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0–100. Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai, semakin baik Perubahan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial antar tahun dinyatakan dalam poin.																			
c	Formula perhitungan																			
	Indikator Kesejahteraan Sosial = $\sum_{i=1}^n w_i \times I_i$ Keterangan : - I_i = Nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi - w_i = bobot indikator ke-i, dengan jumlah seluruh bobot 1 <table><tr><th>Dimensi</th><th>Variabel</th><th>Indikator</th><th>Item</th></tr><tr><td rowspan="6">Kebutuhan Dasar (Bobot 27%)</td><td rowspan="3">Pangan</td><td>Ketahanan Pangan</td><td>Indeks Ketahanan Pangan</td></tr><tr><td rowspan="2">Ketercukupan Gizi</td><td>Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita</td></tr><tr><td>Prevalence of Undernourishment (PoU)</td></tr><tr><td>Papan</td><td>Air minum layak</td><td>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak</td></tr><tr><td rowspan="2">Kesehatan</td><td>Derajat Kesehatan</td><td>Prevalensi Stunting</td></tr><tr><td>Akses Layanan Kesehatan</td><td>Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk</td></tr></table>	Dimensi	Variabel	Indikator	Item	Kebutuhan Dasar (Bobot 27%)	Pangan	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Ketercukupan Gizi	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Papan	Air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Kesehatan	Derajat Kesehatan	Prevalensi Stunting	Akses Layanan Kesehatan	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk
Dimensi	Variabel	Indikator	Item																	
Kebutuhan Dasar (Bobot 27%)	Pangan	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan																	
		Ketercukupan Gizi	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita																	
			Prevalence of Undernourishment (PoU)																	
	Papan	Air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak																	
	Kesehatan	Derajat Kesehatan	Prevalensi Stunting																	
		Akses Layanan Kesehatan	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk																	

			Jaminan Sosial	Kepemilikan Jaminan Sosial	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
			Rasa Aman	Keamanan Lingkungan	Indeks Risiko Bencana
			Physical Mobility	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas dan lansia
					Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas lansia
					Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas
				Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas dan lansia
					Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas lansia
					Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas
		Peranan Sosial (Bobor 31%)	Partisipasi	Keikutsertan	Terdapat keterwakilan pada kelompok rentan sosial (minimal 4 kelompok rentan) dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)
					Keterwakilan masyarakat rentan sosial yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)
					Terdapat kelompok Lansia yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD
					Keterwakilan Kelompok Lansia dalam forum

					perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD
					Terdapat kelompok Disabilitas yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD
					Keterwakilan Kelompok disabilitas dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD
				Keputusan	Terdapat Keterwakilan Kelompok Rentan Sosial (minimal 4 kelompok rentan) yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD
					Keterwakilan masyarakat rentan sosial yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)
					Terdapat Kelompok Lansia yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD
					Keterwakilan Kelompok Lansia yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD
					Terdapat kelompok Disabilitas yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD
					Keterwakilan Kelompok Disabilitas memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD
				Kontrol	Terdapat kelompok/organisasi rentan sosial di Kab/Kota

					Rasio masyarakat rentan sosial (Lansia, Perempuan, penyandang disabilitas) yang masuk dalam parlemen (DPRD)
					Terdapat kelompok Lansia di Kab/Kota
					Rasio Lansia yang masuk dalam parlemen (DPRD)
					Terdapat kelompok disabilitas di Kab/Kota
					Rasio disabilitas yang masuk dalam parlemen (DPRD)
		Kohesi Sosial	Relasi Sosial		% Masyarakat rentan sosial yang tergabung dalam organisasi masyarakat
					% Lansia yang tergabung dalam organisasi masyarakat
					% disabilitas yang tergabung dalam organisasi masyarakat
			Keterhubungan		% Kejadian kekerasan/ Bullying terhadap masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Perempuan, Anak, penyandang disabilitas)
					% Kejadian kekerasan/ Bullying terhadap Lansia
					% Kejadian kekerasan/ Bullying terhadap disabilitas
					% Masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Anak, Gelandangan/Pengemis, penyandang disabilitas) terlanjar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial
					Persentase Masyarakat Lanjut Usia Terlanjar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti
					Persentase Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlanjar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti
			Kepatuhan Sosial		% Penurunan Angka kriminalitas dalam setahun

					Kesetaraan	% Lansia yang yang melakukan pelanggaran hukum			
						% Disabilitas yang yang melakukan pelanggaran hukum			
						Angka Partisipasi Murni			
						Indeks Ketimpangan Gender			
						% Sekolah non SLB yang yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi			
						% Siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah non-SLB			
						% Penyandang Disabilitas yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif			
						% Masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif			
					Kualitas Hidup	% Masyarakat yang mengakses layanan polijiwa/pskiatater (depresi, stress, kecemasan)			
					Kepastian hukum	Nilai SPI KPK			
					Kebijakan inklusif	Terdapat Kebijakan (Perda) tentang Lansia			
						Terdapat Kebijakan (Perda) tentang Disabilitas			
					Insentif ekonomi	Indeks Persaingan Usaha			
						Indeks Tata Kelola Pengadaan			
				Keberdayaan Ekonomi (Bobot 42%)	Kelembagaan Inklusif	Partisipasi Ekonomi	Kemiskinan		
							PDRB ADHB		
							Gini Rasio		
							Jumlah Penduduk		
							Pengeluaran per Kapita		
				d	Sumber Data				
					Kementerian Sosial, melalui publikasi atau tabel statistik Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat provinsi/kabupaten/ kota.				
				e	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :				
					Dinas Sosial Kabupaten Gresik				

No	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	I.K.S.1.1	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang tertangani
2	Meningkatnya kebermanfaatan basis data kemiskinan	I.K.S.2.1	Persentase data kemiskinan yang digunakan dalam menunjang program prioritas daerah

I.K.S.1.1	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang tertangani	
	a	Definisi :
		Pemerlu Atensi Sosial (PAS) merupakan penyebutan yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PAS mencakup perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau kerentanan sosial sehingga memerlukan layanan dan intervensi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang tertangani dapat diterjemahkan sebagai Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang telah memperoleh penanganan atau layanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku. Pemerlu Atensi Sosial (PAS) terdiri dari 12 jenis, yaitu anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasis khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat bermasalah sosial, perempuan rentan, dan fakir miskin.
	b	Satuan
		Persen. Sifat indikator Positif : semakin tinggi persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang ditangani, semakin baik kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, karena menunjukkan semakin banyak Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang telah memperoleh layanan, bantuan, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, atau jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang ditetapkan.
	c	Formula Perhitungan
		$\text{Persentase PAS yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah PAS yang telah memperoleh penanganan}}{\text{Jumlah seluruh PAS yang menjadi sasaran}} \times 100\%$

	d	Sumber Data
		Data penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
	e	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik
I.K.S.2.1		Persentase data kemiskinan yang digunakan dalam menunjang program prioritas daerah
	a	Definisi :
		Data kemiskinan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program prioritas daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase data kemiskinan yang digunakan dalam menunjang program prioritas daerah dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kemiskinan sebagai dasar penunjang program penanggulangan kemiskinan daerah. Terdapat 15 Perangkat Daerah yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan terdiri dari : - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

		- Dinas Lingkungan Hidup, dan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
	b	Satuan
		Persen. Sifat indikator Positif : semakin tinggi Persentase data kemiskinan yang digunakan dalam menunjang program prioritas daerah, semakin baik kualitas perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas daerah karena didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.
	c	Formula Perhitungan
		Persentase data kemiskinan yang digunakan dalam menunjang program prioritas daerah = Jumlah PD yang memanfaatkan data kemiskinan Jumlah PD pengampu program penanggulangan kemiskinan $\times 100\%$
	d	Sumber Data
		Data pemadanan penduduk miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
	e	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Gresik, 5 Agustus 2026
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Gresik,



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740825 200604 2 016